

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2015. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang.
- Buku Panduan Akademik, 2016. *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Kota Lhokseumawe.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Christine.T.S.Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. BP. Balai Pustaka.
- Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2001. *Diskriminasi Ras dalam Kerangka Pemajuan & Perlindungan HAM*. Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Joko, J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Kantaprawira, 1993. Rusadi. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru. Bandung.
- Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moelyatno, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Maria Farida Indrati. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Nurudin Hadi, 2007. *Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1987. *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UNPAR. Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 (empat).

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUUVII/2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 September 2014, Purwokerto: FH Unsoed, 2014.

Lani Sujiagnes Panjaitan, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)*, artikel dalam *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 3, Juni 2016.

Nur Widyastanti, 2005. “*Kedudukan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dalam Tatanan Konsep Demokrasi Di Indonesia*”, Tesis Pasca Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Syahrudin, 2010. “*Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*”, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Yosi Dewi Mahayanthi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Ilmu Hukum: INOVATIF, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 4, Nomor 5, 2011.

Yulia Netta. 2013. “Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan*. Volume I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Yance Arizona, 2007. *Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Perbandingan Putusan Pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Yandi Nurul Asmi, *Analisis Normatif terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik sebagai Pidana Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

D. WEBSITE

Banu Ibenovich Abdillah, *Pencabutan Hak Politik Koruptor*, <https://alpha-i.or.id/kabar-alpha-i/pencabutan-hak-politik-koruptor/>, Demokrasi, HAM & Tata Kelola, diakses pada 2 Agustus 2019.

<https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantankoruptor-jadi-caleg-pemilu-2019>, ditelusuri pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 20:12

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255>, diakses pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 20:12.

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/155a84174cd2499a9ef5604479be77e6.pdf, diakses pada 27 Desember 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpusudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg>, ditelusuri pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 21:02.

Mimin Dwi Hartono, *Pencabutan Hak Politik Koruptor*, <https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor>, Staf Senior Komnas HAM, diakses pada 2 Agustus 2019.